

Nama Anggota Kelompok 1 :

1.Indri Safitri	1916041026/Reg B
2.Arif Rahman Hakim	1916041028/Reg B
3.Faradilla	1916041032/Reg B
4.Tria Permatasari	1916041036/Reg B
5.Elvina Ayu Andini	1916041042/Reg B
6.Laila Rahmawati	1916041048/Reg B

Mata Kuliah : Analysis Kebijakan Publik

Aktor Aktor Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu pada keadaan tertentu demi mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang ahli bernama Dye (Islamy, 1998) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan .Tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan publik adalah pemecahan masalah yang ada untuk membangun kesejahteraan bersama. Dalam prosesnya, kebijakan public ini melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Untuk memenuhi setiap tahap tersebut, tentunya dibutuhkan individu individu maupun kelompok sebagai pelaku yang menjalankannya. Individu maupun kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai aktor kebijakan. Artinya, aktor aktor kebijakan publik merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan publik.

Dan terdapat juga menurut pendapat Winarno (2005), jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Dan para aktor tersebut harus mempunyai karakteristik yang dapat menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi proses kebijakan itu sendiri.

Para aktor kebijakan publik tentu menjadi pengaruh penting dalam setiap kebijakan publik yang lahir dan diimplementasikan untuk akhirnya dievaluasi. Karena pada dasarnya aktor-aktor di dalam kebijakan merupakan pihak yang menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interrelasi cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifat yang harmoni (Madani, 2011:37). Misalnya pada tahap perumusan, sudut pandang dan kepentingan aktor yang berperan sebagai formulator akan memberikan sumbangsih besar pada rumusan yang

dihasilkan. Contoh ini sesuai dengan konsep kebijakan dalam buku *Kebijakan Publik* bahwa kearifan aktor dalam lembaga terkait merupakan pengaruh dari lahirnya kebijakan publik (Taufiqurakhman, 2014). Tidak hanya itu, hubungan antar aktor yang satu dengan lainnya juga sangat berpengaruh pada seluruh output dari setiap proses kebijakan publik.

Mengingat bahwa kebijakan publik dipahami sebagai keputusan pemerintah dengan tujuan masyarakat, maka aktor kebijakan publik secara garis besar adalah pihak pemerintah dan non pemerintah.

1. Aktor pemerintah

Pemerintah menjadi aktor dalam kebijakan publik karena kebijakan publik adalah salah satu hak dan kuasanya selaku penyelenggara Negara. Aktor pemerintah adalah aktor dalam kebijakan publik yang berasal dari lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan jajarannya.. Setiap lembaga ini tentu memiliki perannya masing masing dengan kedudukannya sebagai aktor. Berikut penjelasannya :

→ Legislatif

Lembaga legislatif dalam kedudukannya sebagai aktor kebijakan publik menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kebijakan. Perannya adalah menyusun dan mengagendakan permasalahan permasalahan publik yang akan diformulasikan menjadi suatu kebijakan publik. Dalam konsep ini, lembaga legislatif berperan untuk melakukan konversi input menjadi output. Input yang dimaksud adalah dukungan maupun tuntutan pada suatu sistem maupun keadaan. Input ini kemudian diproses menjadi output berupa kebijakan.

Lembaga legislatif juga menjalankan perannya pada salah satu tahap perumusan kebijakan yaitu *bargaining*. Tahap ini adalah tawar menawar antar aktor kebijakan untuk mengintegrasikan setiap kepentingan.

→ Eksekutif

Lembaga eksekutif dipahami sebagai lembaga yang bertugas melakukan eksekusi atau disebut eksekutor. Sesuai tugasnya ini, peran lembaga eksekutif sebagai aktor kebijakan tentu menerapkan serta merealisasikan kebijakan yang telah dirumuskan legislatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden serta jajaran menterinya.

→ Yudikatif

Lembaga yudikatif sebagai aktor kebijakan publik berperan sebagai lembaga peradilan yang berhak menelaah sinkronisasi antara keputusan legislatif dan eksekutif dengan konstitusi negara. Tindak lanjut dari telaah ini adalah keputusan yudikatif untuk men-sah-kan kebijakan yang sesuai dan membatalkan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

2. Aktor non pemerintah

Aktor non pemerintah adalah aktor yang turut berperan dalam kebijakan publik namun berada diluar lingkaran pemerintahan. Aktor aktor non pemerintah ini termasuk masyarakat, partai politik, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Dengan kedudukannya sebagai aktor, setiap pihak tentu memiliki perannya masing masing yaitu sebagai berikut :

→ Masyarakat

Masyarakat dalam agenda kebijakan publik memiliki peran yang cukup penting. Hal ini ditandai dengan pengaruhnya pada input maupun output kebijakan. Pada bagian input, masyarakat sebagai aktor kebijakan publik menjadi aktor yang dituju untuk memperoleh informasi dukungan maupun tuntutan karena tujuan kebijakan publik itu sendiri. Maksudnya, tujuan kebijakan publik adalah menyelesaikan persoalan di masyarakat tentunya membutuhkan informasi dari masyarakat itu sendiri mengingat mereka yang merasakannya. Pada bagian output, kebijakan publik selama ini dominan ditujukan pada masyarakat sebagai objek sasaran yang menerapkannya. Bisa dipahami bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan aktor masyarakat ini untuk melaksanakannya.

→ Partai Politik

Sebagai salah satu aktor kebijakan publik, partai politik berperan sebagai agregator kepentingan yang ada di masyarakat dalam bentuk alternatif kebijakan agar tersalurkan kepada lembaga yang berwenang. Perannya ini sesuai dengan makna partai politik yaitu alat mencapai kekuasaan.

→ Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan sebagai aktor kebijakan berperan melakukan artikulasi kepentingan yang ada agar menjadi alternatif kebijakan yang menurut mereka sesuai. Besarnya pengaruh kelompok ini biasanya dipengaruhi oleh keterkaitan kelompok beserta anggota didalamnya dengan isu yang ada.

→ NGO

Meskipun klasifikasi aktor pemerintah dan non pemerintah sudah cukup menggambarkan siapa saja pelaku yang berperan dalam kebijakan publik, aktor aktor kebijakan juga dapat dipahami melalui teori aktor kebijakan (Network Actors) yang dikemukakan oleh Howlett dan Rames (1995). Teori tersebut menyatakan bahwa aktor aktor kebijakan terdiri dari :

1. Akademisi

Akademisi merupakan aktor yang berlaku sebagai pemberi informasi secara ilmiah dan berdasarkan kenyataan maupun penelitian. Informasi dari akademisi ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan serta alternatif penyelesaian masalah.

2. Pengusaha

Aktor pengusaha merupakan pihak yang turut menjadi bagian dalam kebijakan publik. Aktor ini berasal dari sektor swasta yang biasanya berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Masyarakat

Masyarakat juga menjadi salah satu aktor kebijakan publik yang diposisikan sebagai sasaran. Artinya, aktor ini lebih dominan berperan pada penerapan kebijakan dibanding proses kebijakan yang lain. Meskipun begitu, kedudukan masyarakat sebagai aktor kebijakan sangat berpengaruh pada hasil dari kebijakan publik tersebut. Hal ini karena kebijakan publik tidak dapat terlaksana tanpa sasaran yang melaksanakannya (masyarakat).

4. Government (Pemerintah)

Pemerintah merupakan aktor kebijakan yang memiliki otoritas untuk memutuskan suatu kebijakan. Otoritas ini dimiliki karena kedudukannya sebagai pihak penyelenggara negara. Artinya, pemerintah sangat berperan dalam kehadiran suatu kebijakan.

5. Media Massa

Aktor kebijakan publik lainnya adalah pihak media yang berperan sebagai jembatan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Orang-orang yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik biasa disebut partisipan atau peserta perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu kebijakan publik mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis) maka para aktor di setiap formulasi kebijakan tersebut dapat berbeda-beda.

Supaya kebijakan publik yang dihasilkan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan membangun jaringan kepada para aktor dari luar pemerintah, yaitu aktor privat dan aktor civil society. Dan bahwasanya pemerintah sudah tidak pantas memandang mereka sebagai sebuah lawan politik, akan tetapi lebih baik memandang mereka sebagai partner dalam mencari, membuat, serta menentukan sebuah kebijakan publik.

Contoh Kasus

Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta

Daerah Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tambak udang. Awal mula maraknya tambak yang berada di selatan Bantul ini ditengarai oleh dibangunnya satu tambak besar milik PT. Indokor. Banyaknya lahan kosong yang berada di sekitar tambak milik PT. Indokor, membuat masyarakat ikut membangun tambak. Banyak dari tambak-tambak di daerah tersebut merupakan tambak liar dan tidak memiliki izin. Pembuangan limbah yang tidak dikelola lebih dahulu menyebabkan lingkungan yang berada di sekitar tambak menjadi rusak. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya Bupati Bantul mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan penghentian pembangunan tambak udang dan juga penutupan secara keseluruhan. Surat edaran ini dikeluarkan dengan memperhatikan masukan dari Forum Aspirasi Masyarakat Petani dan Peternak Samas dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberadaan tambak yang mengganggu perekonomian warga setempat. Dengan memperhatikan berbagai faktor inilah maka kemudian kebijakan relokasi diambil sebagai pengganti kebijakan penutupan tambak. Relokasi dilakukan sebagai langkah penataan tambak udang liar yang berada di sepanjang Pantai Selatan.

Menilai bahwa adanya kebijakan relokasi merupakan kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan, sehingga pemerintah provinsi DIY mengadakan beberapa Pertemuan yang dilakukan untuk membahas mengenai kebijakan relokasi tambak udang Bantul yang dihadiri oleh dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dinas terkait lainnya. Setelah masyarakat mengetahui mengenai rencana pengimplementasian kebijakan tersebut, masyarakat Desa Srigading yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mengadakan protes di depan kantor Kepala Desa Srigading. Mereka menuntut bahwa adanya tambak yang sudah ada di Desa Srigading menyebabkan pencemaran rusaknya hasil pertanian mereka sedangkan petambak mengalami keuntungan yang sangat besar.

Akibat dari adanya protes yang dilakukan oleh masyarakat, akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan Hearing, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keterlibatan dari masyarakat dengan mengumpulkan seluruh petani dan petambak di Pengklik, Pantai Samas. Namun hasil akhirnya adalah tidak adanya titik temu antara masyarakat dengan pemerintah. Selain pertemuan yang diadakan dengan masyarakat, dilakukan pula pertemuan antar pemerintah. Pertemuan telah dilakukan namun terdapat beberapa dinas yang selalu absen dalam pertemuan ini. Terjadi dua kubu di dalam pemerintah, terdapat dinas yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan ini. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Bantul merupakan salah satu dinas yang kontra terhadap kebijakan ini dikarenakan kebijakan ini dibuat tidak didasarkan pada adanya dokumen legal formal. Salah satu pertemuan pernah menghasilkan posisi tawar menawar dengan mengubah titik relokasi dan menggeser ke

barat Pantai Samas. Bargaining terjadi dalam proses formulasi kebijakan yang dilakukan antar aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dari para aktor (Madani, 2010:37). Namun hasil akhir yang didapatkan masih belum menemui hasil. Pemerintah Provinsi yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan dinas terkait menjadi jenuh untuk mengadakan pertemuan kembali jika tetap ada dinas yang absen dan tidak mendapatkan hasil. Sehingga sampai saat ini, kebijakan tersebut ditunda sampai waktu yang tidak diketahui.

Melihat dari permasalahan yang terjadi pada kebijakan relokasi tambak udang yang tidak mendapatkan ujung. Dapat terlihat bahwa pola hubungan interaksi dari para aktor dalam perumusan kebijakan relokasi tambak udang hanya sebatas negosiasi saja. Perumusan kebijakan yang ditandai dengan adanya pertemuan aktor untuk membahas permasalahan tidak sampai pada suatu titik. Padahal setiap aktor memiliki peran sesuai dengan kepentingan masing-masing, sehingga dengan tidak adanya proses saling memberi dan menerima (take and give) sampai kompromi dari para aktor menyebabkan kebijakan tersebut hanya sebatas wacana saja. Selain itu, adanya Perbedaan kubu dan kepentingan para aktor kebijakan menjadikan kebijakan relokasi tambak udang tidak sampai pada tahap implementasi. Padahal peran aktor baik itu para pemeran resmi (aktor negara) maupun para pemeran tidak resmi (aktor non-negara) dapat mempengaruhi perumusan suatu kebijakan, dimana setiap aktor mempunyai kepentingan masing-masing di dalam pembuatan kebijakan.

Mapping Stakeholders

A. Pengertian Stakeholders Mapping

Menurut WHO (2007) dalam Lembaga Administrasi Negara (2017 : 113) menyebutkan bahwa pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Selain itu juga, Morris & Baddache (2012) mengemukakan bahwa definisi *stakeholder mapping* adalah sebuah proses penelitian dan diskusi untuk melihat kondisi terkini hubungan perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan menentukan urutan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut sehingga dapat mengidentifikasi siapa saja pihak yang utama bagi perusahaan.

B. Teknik Stakeholder Mapping

Teknik Value Orientation Mapping

Model ini dibuat oleh The Victorian Department of Primary Industries pada tahun 2007 (Kennon dalam Modul Pelatihan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Publik, 2015). Menurut Kennon terbagi empat langkah yang terdiri atas :

1. *Identifying*/Identifikasi

Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi (*identifying*) atau membuat daftar pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan (stakeholders), seperti organisasi dan individu. Selanjutnya, daftar stakeholder tersebut dianalisis (*analyzing*) lebih lanjut untuk memahami relevansinya, memahami hubungan timbal balik antara perusahaan dengan stakeholder, dan memberikan prioritas berdasarkan kepentingan stakeholder. Identifikasi yang dilakukan memecah stakeholder menjadi tiga kelompok, yaitu :

- (a) kelompok kunci adalah berhak mengambil keputusan,
- (b) kelompok internal adalah kelompok yang individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung terhadap program
- (c) kelompok eksternal atau kelompok yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap program tetapi memiliki kepedulian untuk membantu program.

Setiap stakeholders memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu proses pemetaan sosial perlu dilakukan untuk mengetahui derajat power (pengaruh) dan interest (kepentingan) setiap aktor atau instansi.

2. *Analyzing*/Analisis

Tahapan kedua daftar stakeholder tersebut dianalisis (*analyzing*) lebih lanjut untuk memahami relevansinya, memahami hubungan timbal balik antara perusahaan dengan stakeholder, dan memberikan prioritas berdasarkan kepentingan stakeholder.

3. *Mapping*/Pemetaan

Tahapan Ketiga stakeholder dipetakan (*mapping*) sebagai perangkat visualisasi dan analisis yang berguna untuk menentukan stakeholder mana yang paling berpengaruh bagi perusahaan sesuai dengan besarnya kekuatan (*power*) dan pengaruh (*interest*) dari para stakeholder. Tahapan dalam menganalisis stakeholder yang dimaksud dimulai dari menganalisis stakeholder yang diklasifikasikan sebagai subyek (*subjects*), pemain kunci (*key player*), pengikut lain (*crowd*), dan pendukung (*contest setters*) (Gardner et al., 1986; Reet et al., 2009; Thompson, 2011) dalam Wakka, 2014).

4. *Prioritizing*/Tetapkan Prioritas

Tahapan keempat analisis stakeholder dilanjutkan dengan melakukan pemeringkatan prioritas (*prioritizing*) atas stakeholder berdasarkan tingkat kepentingannya. Tingkat prioritas memberi panduan bagi perusahaan dalam mengidentifikasi masalah yang terkait dengan stakeholder dan menentukan keputusan penyelesaian masalah tersebut. Salah satunya terkait dengan permasalahan terkait dengan permintaan bantuan dana dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh stakeholder.

C. Alat untuk Mengklasifikasikan Stakeholder

Ada beberapa alat untuk mengklasifikasikan stakeholder seperti basic stakeholder analysis technique, power versus interest grids, stakeholder influence diagrams, dan participation planning matrix interventions.

D. Hasil Pemetaan Stakeholder

Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting sebagai berikut ini :

- 1) Siapa saja yang akan dipengaruhi;
- 2) Siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan;
- 3) Pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan
- 4) Kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Contoh

Stakeholders Internal dan Stakeholders Eksternal

Pengertian Stakeholders Internal ialah stakeholder yang berada dalam lingkungan suatu organisasi perusahaan. Misalnya : pemegang saham, manajer dan karyawan.



Sedangkan pengertian Stakeholder Eksternal ialah stakeholder yang berada diluar suatu organisasi atau entitas atau juga perusahaan. Misalnya : pemerintah, media massa (pers), masyarakat, konsumen atau pelanggan, kelompok social responsible investor, penyalur dan pemasok, licensing partner dan yang lainnya.



REFERENSI

- Dachi, C. S., & Djakman, C. D. (2020). Penerapan Stakeholder Engagement dalam Corporate Social Responsibility: Studi Kasus Pada Rumah Sakit Mata X. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 291-306.
- Fedora, S. D., & Hudiyono, R. F. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Unit Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(1).
- Muadi, Sholih, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani. 2016. *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Review Politik, 6(2).
- Nurfakhirah, A. A., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN BUMDES DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS BUMDES MITRA SEJAHTERA DESA MENDONGAN KECAMATAN SUMOWONO). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 184-204.
- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Stakeholders Mapping in Overcoming Child Marriage Problems in Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 495-509.
- Pritasari, Luqyana Amanta dan Beaola Kusumasari. 2019. *Intervensi Aktor daam Mempengaruhi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta*. Borneo Administrator, 15(2) 179-198.
- Rakhmadany, A., Tahsinurridlo, M., Fauziyah, L., Rahmawati, N. A., & Aidah, S. (2020). Stakeholder Analysis Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) Oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1).
- Suherman, Diki. 2020. *Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 di Indonesia*. Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 2(2).
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama.
- FL Mahmud, dan HT Ardianto. 2020. *Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta)*. Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan , Vol. 9 (02) 6.